

NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja
1		2
I	PROGRAM Penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Disnaker)
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.a	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.b	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Keuangan
2.a	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian
3.a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan
4	Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah
4.a	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
4.b	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
4.c	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
4.d	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
4.e	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
4.f	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
4.g	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah yang diadakan
5.a	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6.a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
6.b	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
6.c	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
6.d	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah yang dipelihara
7.a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
7.b	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
7.c	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
7.d	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
II	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase dokumen Perencanaan Ketenagakerjaan kab/kota

1	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Tersusunnya Dokumen Rencana tenaga Kerja
1.a	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang Mengikuti Pelatihan Penyusunan RTK Mikro
III	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari kerja Yang Berkompeten
1	Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kerja Jumlah Lembaga mendapatkan informasi Layanan BLK
1.a	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan
1.b	Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi
1.c	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana
IV	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan
1	Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja
1.a	Sub Kegiatan Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya
1.b	Sub Kegiatan Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD
1.c	Sub Kegiatan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan
1.d	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja
2	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
2.a	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)
2.b	Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja
3	Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Jumlah PMI yang Mendapat Pelayanan dan Perlindungan
3.a	Sub Kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya
4	Kegiatan Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah RPTKA perpanjangan yang mendapatkan pengesahan
4.a	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA
V	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Perusahaan Menengah yang dibina
1	Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang diakreditasi
1.a	Sub Kegiatan Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga latihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi
2	Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Pengukuran Kinerja Perusahaan dan Kompetensi SDM
2.a	Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah
VI	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang telah memiliki sarana hubungan industrial

1	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1(satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota
1.a	Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online
1.b	Sub Kegiatan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online
1.c	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek
2	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Terkait Permasalahan Ketenagakerjaan diprovinsi Kepulauan Bangka Belitung
2.a	Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang Dicegah
2.b	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina
2.c	Sub Kegiatan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi
3	Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Penetapan Upah Minimum Provinsi
3.a	Sub Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP
3.b	Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
VII	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yang dilakukan pengawasan Norma Ketenagakerjaan
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah pengawasan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan
		Jumlah Penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan Yang Terjadi Di perusahaan
1.a	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)
1.b	Sub Kegiatan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan
1.c	Sub Kegiatan Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3
VIII	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kawasan Transmigrasi Yang dikembangkan
1.	Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Persentase SDM transmigrasi yang dibina
1.a	Sub Kegiatan Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina
1.b	Sub Kegiatan Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan